

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH PEDESAAN

(Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo)

IMPLEMENTATION OF FOOD SECURITY POLICIES IN THE REGION RURAL

(Study on Fish Cultivation Practices in Medaeng Village, Sidoarjo)

Hasana Nur Fatimah ¹, Alfiano Septian Yoga Pradana ², Maghfira Putri Erisesa ³,
Meisya Anggy Tania ⁴, Reffita Zulfatuz Zakiya ⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Email: hasana.21022@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dalam menghadapi dinamika global dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi serta kearifan lokal. Mewujudkan kecukupan pangan bagi masyarakat desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan seluruh desa di Indonesia terlepas dari kerawanan pangan, menjadi dasar adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan ketahanan pangan hewani yang berorientasi pada program Kolam Budidaya Ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani yang stabil di Desa Medaeng. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan empat indikator utama meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa pengumpulan data melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan dokumen. Pengambilan data dilakukan di Desa Medaeng, Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa informan yang terlibat meliputi Kepala Desa, Carik dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut: penggunaan teknologi menjadi salah satu alat komunikasi sebagai pengaktualan dari kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dapat dikatakan bahwa karakter atau sikap dan perilaku para peserta kebijakan ketahanan pangan bertanggung jawab dan konsisten dengan aturan yang berlaku untuk pelaksanaan program ini. Program Budidaya Kolam Ikan ini tidak melibatkan banyak pelaku inti kebijakan pada struktur birokrasi untuk mengurangi resiko terjadinya perselisihan. Sebuah kebijakan dikatakan gagal atau tidak efektif apabila tanpa adanya peran yang dilakukan oleh faktor lain.

Kata Kunci: Budidaya Ikan; George C. Edward III; Implementasi Kebijakan; Ketahanan Pangan Hewani

Abstract

Food security is one of the policies that can be carried out by a group of people or more in facing global dynamics by utilizing the potential of natural, human, social, economic resources and local

wisdom. Realizing food sufficiency for village communities, achieving village food self-sufficiency, and ensuring that all villages in Indonesia are free from food insecurity are the basis for this policy. This research focuses on animal food security policies oriented towards the Fish Farming Pond program in meeting stable animal food needs in Medaeng Village. This research uses George Edward III's theory with four main indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive method with two data collection techniques, namely primary data conducted by observation and interviews, while secondary data is in the form of data collection through journals, articles, previous research and documents. Data collection was carried out in Medaeng Village, Sidoarjo Regency with several informants involved including the Village Head, Carik and community groups. The results show that the implementation of food security policies is as follows: The use of technology is one of the communication tools as an actualization of food security policies. Supportive and adequate resource factors to realize the implementation of food security policies. It can be said that the character or attitude and behavior of the participants in the food security policy are responsible and consistent with the rules that apply to the implementation of this program. This Fish Pond Cultivation Program does not involve many core policy actors in the bureaucratic structure to reduce the risk of disputes. A policy is said to fail or be ineffective if there is no role played by other factors.

Keyword: Animal Food Security; George C. Edward III; Fish Farming; Policy Implementation

Pendahuluan

Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengandung kondisi penegakan pembangunan ketahanan pangan di Indonesia yang berdasarkan kebebasan dan kedaulatan pangan. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa kekuasaan negeri bisa terancam apabila pemuasan pangan suatu negeri belum mandiri. Undang-Undang ini mengedepankan kepuasan keperluan pangan dengan pemanfaatan kekuatan sumber daya alam, sosial, manusia, kebijaksanaan lokal dan ekonomi. Secara tidak langsung mengesahkan bagian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diamanati bahwa cara pemuasan keperluan pangan rimba diutamakan bersumber dari pembentukan bagian dalam negeri. Upaya ini mengatakan agar dalam menguatkan ketahanan pangan harus bertonggakkkan otonomi dan kelayakan pangan yang diakomodasi oleh sistem ketersediaan, bagian dan sasaran pangan dengan perpaduan yang telah dijabarkan bagian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Fazry, 2019).

Segala apa yang berasal dari sumber daya alam hayati, seperti produk pertanian, perikanan, peternakan, hasil hutan, perkebunan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai hidangan untuk kudapan manusia yang termasuk bahan tambahan pangan, bahan dasar pangan, dan bahan lainnya disebut sebagai pangan (Pemerintah Pusat, 2012). Bahan pangan manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan hewani. Dilansir dari laman simpeltan.jogjaprovo.go.id bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang disarikan dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang disarikan dari hewan. Pangan hewani memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan makanan nabati, yaitu memiliki masa penyimpanan yang lebih pendek (kecuali telur), bertekstur lunak dan lembek. Pangan hewani biasanya merupakan sumber lemak dan protein, sedangkan pangan nabati merupakan sumber

vitamin, karbohidrat, mineral, protein, dan lemak (BPSDMP, 2018).

Bahan pangan juga dikelompokkan berdasarkan mudah tidaknya kerusakan dalam daya tahan penyimpanan. Dari hasil klasifikasi tersebut terdapat empat jenis kelompok, yaitu:

(1) *High Perishable Food*, merupakan jenis bahan pangan yang lebih mudah rusak yakni dalam jangka waktu satu sampai enam jam. Bahan pangan ini antara lain susu, daging, ikan, buah dan sayur-sayuran; (2) *Perishable Food*, merupakan jenis bahan pangan yang mudah rusak jika tidak disimpan dalam lemari es dalam jangka waktu satu sampai dua hari. Penyimpanan dalam lemari es dilakukan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Bahan pangan ini antara lain daging, ikan, unggas, olahan susu, dan segala sisa makanan yang dimasak; (3) *Semi Perishable Food*, merupakan bahan makanan yang memiliki daya simpan tahan lama dalam jangka waktu satu minggu pada suhu ruang. Bahan pangan ini antara lain kentang, bawang, jahe dan biskuit; (4) *Non Perishable Food*, adalah bahan makanan yang memiliki masa simpan tahan lama dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Bahan pangan ini antara lain makanan kaleng, jeli dan dried fruit (Setiawan, 2022).

Penelitian tentang kebijakan pangan hewani pernah dibahas oleh (Susanto et al., 2020) mereka menyatakan bahwa sektor perikanan sebagai penyediaan pangan hewani. Studi berikutnya tentang yang dibahas oleh (Funge- Smith & Bennett, 2019) menyatakan bahwa perikanan darat penting bagi kelompok masyarakat yang rentan secara sosial, ekonomi, dan gizi. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh (Saputri & Rachmawatie, 2020) mereka mengatakan bahwa program ketahanan pangan dengan membudidayakan ikan dalam ember merupakan salah satu strategi dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan merupakan cara memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian berikutnya (Yusuf & Tajerin, 2017) menyatakan bahwa ketahanan pangan ikan pada rumah tangga biota perairan tangkap laut dalam rasio kecil tersebut berhubungan positif dan konkret dengan peubah tingkat pendidikan, nilai aset, pendapatan rumah tangga, dan budaya makan ikan. Penelitian selanjutnya oleh (Fabinyi et al, 2017) mereka menyatakan bahwa ikan dan ketahanan pangan harus dipertimbangkan secara lebih mendalam jika konservasi laut ingin terlibat dengan ketahanan pangan sebagai tujuan.

Dilansir dari laman ekon.go.id, pertumbuhan yang signifikan ekonomi Indonesia terjadi pada kuartal satu, lebih tepatnya saat memasuki tahun 2021 meskipun masih terdapat kontraksi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga telah mengutarakan peran dari pemerintah untuk memberdayakan ketahanan pangan dan mengoptimalkan kesejahteraan petani dalam bidang pertanian dan nelayan dalam bidang perikanan dan program-program tersebut akan terus dijalankan dengan harapan mengatasi persoalan kebutuhan gizi (Limanseto, 2021). Dilansir juga pada laman kemenkeu.go.id, ketahanan pangan juga digunakan untuk menghadapi dinamika global dengan fokus merealisasikan pangan yang mana memenuhi hak manusia untuk memperoleh pangan yang berkualitas baik dan disesuaikan dengan budaya lokal masing-masing daerah serta bersifat berkelanjutan dan ramah lingkungan (*food sovereignty*) dan terpenuhinya pangan baik negara maupun perorangan (*food resilience*). Dengan demikian, ketersediaan pangan dapat diperoleh

oleh berbagai pihak yang dapat turut menjaga stabilitas ekonomi nasional (Kemenkeu,

2022). Setelah itu, muncul pedoman ketahanan pangan yang diterbitkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupa Keputusan Menteri Desa (KepmenDesa) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Hal tersebut menjadi dasar untuk memastikan seluruh desa di Indonesia terlepas dari kerawanan pangan, menciptakan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat desa, dan pencapaian desa yang mandiri di bidang pangan (Administrator Sarimekar, 2022).

Artikel ini berfokus pada kebijakan ketahanan pangan hewani di Sidoarjo tepatnya di Desa Medaeng yang mana berorientasi pada program pembudidayaan kolam ikan. Program tersebut didorong dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa untuk menerapkan kebijakan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, entah itu ketahanan pangan nabati maupun hewani yang diselaraskan dengan kesiapan potensi alam yang ada di setiap wilayahnya. Pemerintah desa berkolaborasi dalam pendayagunaan Dana Desa dengan tujuan menumbuhkan ketahanan pangan yang efektif di seluruh desa Indonesia.

Tinjauan Pustaka

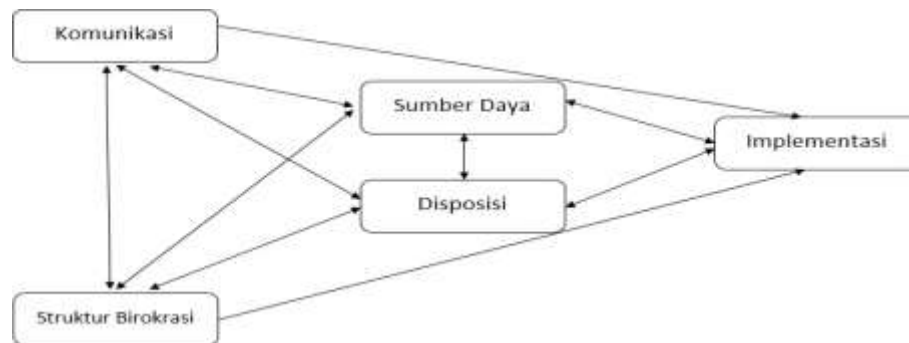
Dalam UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 1 ayat 17 tertulis bahwa “Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah, mutu, aman serta merata dan terjangkau.” Dengan kata lain, pemahaman dari ketahanan pangan dapat diartikan sebagai terwujudnya kualitas dan kuantitas kebutuhan gizi pangan setiap individu sehingga dapat beraktivitas dan hidup sehat untuk dapat memenuhi keinginan *humanistic* selama masa hidupnya (Karmila, 2018). Menurut FAO (2013) dalam (Sastrosupadi, 2019) menerangkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi setiap orang dari waktu ke waktu yang mempunyai kekuatan secara fisik dan ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi serta memiliki prioritas pemilihan makanan yang sehat sehari-hari.

Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi dengan model penerapan kebijakan publiknya dari George C. Edward III yang disebut *direct and indirect impact on implementation*. Empat elemen dari pendekatan teori Edward III pada model teori ini sangat menentukan kesuksesan rekayasa suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi. Keefektifan komunikasi dapat dilihat dari pesan yang diterima, apakah sesuai dengan pesan pengirim. Hal tersebut dibuktikan dengan penguraian mengenai program ketahanan pangan dari Kementerian Desa (KemenDesa) kepada segenap perangkat desa dan masyarakat desa yang direalisasikan sebagai Kolam Budidaya Ikan.
2. Sumber Daya. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila sumber dayanya belum terpenuhi secara maksimal. Terdapat beberapa indikator sumber daya dalam teori George C Edward III berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial atau anggaran, serta sarana dan prasarana.
3. Disposisi merupakan sebuah sikap, perilaku, watak dan karakteristik para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi dapat diukur melalui tingkat konsistensi, komitmen dan pengelolaan kebijakan ketahanan oleh para pelaku untuk dapat mencapai tujuan program Kolam Budidaya Ikan.
4. Struktur Birokrasi. Pelaksana suatu kebijakan sesuai dengan urutan jabatan dan tugas secara keseluruhan mulai dari pemimpin sampai anggota baik itu struktur pemerintahan

maupun organisasi swasta. Dalam sebuah program kebijakan, struktur birokrasi sebagai salah satu aspek penting untuk kelancaran suatu program kebijakan.

Gambar 1.0
Teori Edward
II



Sumber: Edward III dalam Gustaman & Setiyono, 2019

Metode

Artikel ini menggunakan metode pengkajian deskriptif kualitatif. Menurut (Abdussamad, 2021) pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada kondisi yang sesuai dengan kenyataan apa adanya dari objek yang diteliti tanpa ada intervensi dari kondisi peneliti sehingga konteksnya tidak berubah. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang mengarahkan penelitian dalam mencari atau mengamati keadaan sosial yang akan dikaji secara rinci. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian atau narasumber untuk mendapatkan informasi lengkap tentang penelitian "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Wilayah Pedesaan (Studi pada Praktik Kolam Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo)." Pada penelitian ini teknik pengumpulan data primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti memilih kebijakan ketahanan pangan program kolam budidaya ikan di Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk mengamati teknis budidaya ikan, hambatan yang dihadapi saat rekayasa kebijakan, bagaimana masyarakat dapat menerima kebijakan ini, serta perolehan kesuksesan dari kebijakan tersebut.
2. Wawancara (*interview*), narasumber yang dipilih peneliti yakni, Kepala Desa, Carik dan POKMAS (Kelompok Masyarakat). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang lebih akurat sehingga, penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Narasumber juga memiliki peran sebagai pihak yang memahami jalannya implementasi program kebijakan tersebut.
3. Bukti kegiatan penelitian. Data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan berupa foto-foto kegiatan penelitian, wawancara dengan informan, lokasi Kolam Budidaya

Ikan dan rekaman wawancara. Data-data tersebut disimpan dan digunakan peneliti sebagai bukti akurat pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data, informasi atau fakta yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain berupa jurnal, artikel, *e-book* dan dokumen yang mana bersumber berasal dari penelitian terdahulu. Data tersebut didapatkan melalui publikasi pemerintah, situs dan e- jurnal. Data sekunder relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama atau cenderung lebih singkat. Namun, data tersebut memiliki kemungkinan tidak dapat menjawab pertanyaan peneliti secara spesifik.

Hasil dan Pembahasan

Dilansir dari laman disketapang.bantenprov.go.id terdapat tiga aspek ketahanan pangan yang melingkupi (1) Aspek ketersediaan pangan dimana adanya hasil olahan pangan lokal dan simpanan pangan dalam negeri serta impor jika kedua sumber utama tidak mencukupi. Hal ini ditentukan oleh olahan pangan di setiap wilayah; (2) Aspek akses pangan yang mungkin tidak bisa dicapai oleh rumah tangga dikarenakan hambatan akses ekonomi, materi dan sosial; (3) Aspek pemanfaatan pangan yang melingkupi (1) Pendayagunaan pangan yang mampu dicapai oleh rumah tangga; (2) Kapasitas individu dalam menyerap unsur gizi dengan maksimal oleh raga (DISKETAPANG, 2021). Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menjadi rujukan terbentuknya kebijakan ketahanan pangan Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo bahwa sedang menerapkan program yang diberi nama “Kolam Budidaya Ikan”. Program ini termasuk kedalam jenis ketahanan pangan hewani. Ikan yang dibudidaya beraneka macam, yaitu ikan nila, ikan tombro, dan ikan gurame (Bupati Sidoarjo, 2019).

Dari hasil *interview* yang telah dilakukan penulis pada tanggal 28 Oktober 2022, program yang diberi nama Kolam Budidaya Ikan ini merupakan program yang pertama kali dibentuk karena adanya program ketahanan pangan dari Kementerian Desa (Kemendesa) yang mana memberikan dua pilihan ketahanan pangan, yaitu hewani atau nabati. Karena potensi sumber daya yang mendukung dan memadai, Kepala desa memutuskan untuk mewujudkan kebijakan ketahanan pangan, yang bertujuan untuk memberikan bahan pangan (ikan) dengan harga yang murah kepada masyarakat desa.

Program penelitian ini berfokus pada kebijakan ketahanan pangan hewani di Sidoarjo tepatnya di Desa Medaeng yang mana berorientasi pada program pembudidayaan kolam ikan. Program tersebut didorong dengan adanya kebijakan dari Pemerintah desa untuk menerapkan kebijakan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, entah itu ketahanan pangan nabati maupun hewani yang diselaraskan dengan peluang potensi alam yang terdapat di setiap wilayahnya.

Pemerintah desa berkolaborasi dalam penerapan Dana Desa untuk mendorong ketahanan pangan yang efektif di seluruh desa Indonesia. Disamping itu, tujuan dari adanya program ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan pangan, terutama pada konsumsi ikan pada

masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dapat terwujud.

Berdasarkan data tersebut dikaitkan dengan filosofi George Edward III tentang implementasi kebijakan dengan indikator sebagai berikut :

A. Komunikasi

Komunikasi dapat dinyatakan efektif, apabila informasi yang diuraikan oleh informan sama dengan apa yang diterima oleh penerima informasi. Komunikasi dalam teori George Edward III mencakup tiga dimensi penting yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1. Dimensi Transmisi

Untuk mendukung implementasi kebijakan, maka diperlukan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan kepada para pelaksana dengan tujuan agar para pelaksana dapat mengerti dan memahami bagaimana sistem pelaksanaan kebijakan. Kebijakan ketahanan pangan yang berasal dari program Kemendesa ini, disampaikan oleh kepala desa kepada perangkat desa melalui media WhatsApp Group. Selanjutnya, informasi tersebut akan dikomunikasikan oleh ketua RT (Rukun Tetangga) kepada masyarakat melalui forum ataupun musyawarah agar informasi kebijakan ketahanan pangan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat desa. Penyaluran komunikasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disampaikan dengan cara realisasi program secara langsung. Namun pada kenyataannya, realisasi program Kolam Budidaya Ikan ini masih belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat di Desa Medaeng. Salah satu cara yang dilakukan agar perwujudan kebijakan ketahanan pangan dapat diketahui oleh masyarakat yaitu melalui media online, menggunakan platform instagram dengan nama @pemdes.medaeng04.

2. Dimensi Kejelasan

Pemahaman para pelaksana mengenai kebijakan yang akan dijalankan dengan maksud dan tujuan agar sistem pengaplikasian dapat bergerak dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan kebijakan dalam hal ini ketahanan pangan. POKMAS selaku pelaksana program Kolam Budidaya Ikan memahami tugas dan tujuan dari kebijakan ini. Hal ini dapat diamati dari pengaktualan program tersebut yang bergerak dengan efektif dan jelas serta anggota POKMAS bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Buktinya adalah ketua, sekretaris dan dua anggota POKMAS bertugas untuk mengelola kolam ikan selama program tersebut masih berjalan. Selanjutnya, bendahara POKMAS bekerja untuk mengelola keuangan program, mulai dari pengeluaran untuk membuat kolam, pembelian benih ikan, dan pakan ikan. Selanjutnya, tujuan dari program tersebut yang mana untuk mensejahterakan masyarakat sekitar yang kurang mampu dengan menjual ikan dengan harga yang murah juga telah terealisasi meski belum sempurna. Hal ini dibuktikan pada saat panen raya yang dilakukan pada tanggal 7 November 2022.

3. Dimensi Konsistensi

Perintah dalam implementasi kebijakan harus konsisten dan jelas. Faktor

komunikasi program Kolam Budidaya Ikan menempatkan Kepala Desa Medaeng sebagai subjek utama dan POKMAS (Kelompok Masyarakat) sebagai subjek sekunder dalam pengelolaan kebijakan ketahanan pangan program kolam budidaya ikan. Kepala desa berperan sebagai pengontrol jalannya program Kolam Budidaya Ikan dan POKMAS (Kelompok Masyarakat) memiliki tanggung jawab untuk mengelola kolam ikan. Dari sini faktor komunikasi bisa memungkinkan untuk semua orang dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini (Tjilen, 2019).

B. Sumber Daya

Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila sumber dayanya belum terpenuhi secara maksimal. Dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan terdapat beberapa sumber daya, berupa sumber daya manusia, seperti Kepala Desa Medaeng dan POKMAS (Kelompok Masyarakat), serta sumber daya finansial, seperti Dana Desa (Pramono, 2020). Menurut Tjilen (2019), (Tjilen, 2019), kebijakan yang dibuat di atas kertas hanya menjadi rencana yang tidak ada perwujudannya tanpa sumber daya. Terdapat beberapa faktor produksi yang mendukung jalannya program Kolam Budidaya Ikan di Desa Medaeng, yaitu sumber daya alam, sumber daya finansial atau anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

1.) Sumber Daya Alam

Kebijakan ketahanan pangan ini dapat berlangsung karena adanya sumber daya yang mendukung terlaksananya program Kolam Budidaya Ikan. Faktor sumber daya pada program Kolam Budidaya Ikan ini seperti, sumber daya air yang melimpah, dan daerah resapan air yang bagus. Faktor pendukung lainnya yaitu, ketersediaan lahan yang digunakan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang diperuntukkan sebagai kolam budidaya ikan. Kepala Desa Medaeng menuturkan bahwa wilayah di Desa Medaeng memiliki nilai tambah karena tidak rawan banjir ketika musim hujan tiba.

Gambar 2.0
Kolam Ikan



Sumber : Dokumentasi Peneliti (Oktober, 28)

Luas TKD yang digunakan untuk membuat kolam pada kebijakan ketahanan pangan ini telah menghasilkan sebelas kolam ikan. Dengan jenis ikan yang dibudidayakan

pada

kolam pertama adalah ikan nila, ikan gurame, dan ikan tombro. Pembelian bibit ikan berasal dari Pare, Kediri dengan harga yang terbilang lebih murah daripada tempat lain. Hal ini dilakukan agar nilai jual hasil budidaya ikan lebih ekonomis, sehingga masyarakat Desa Medaeng mendapatkan harga yang relatif murah. Kemudian, untuk kolam baru hanya ikan nila dan gurame. Ikan tersebut dijadikan satu dalam satu kolam walaupun program ini memiliki empat dari sebelas kolam yang sedang dalam proses pembuatan. Sebelas kolam yang berada di program kolam budidaya ikan ini memiliki luas yang berbeda-beda, hal ini terjadi karena proses pembuatan kolam yang belum selesai.

2.) Sumber Daya Finansial atau Anggaran

Menurut (Tjilen, 2019), aspek pembiayaan merupakan persoalan lain sebuah implementasi kebijakan, meskipun uang bukan jawaban terhadap kesulitan yang timbul. Tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, disebutkan bahwa “Dana Desa telah ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).” Sejumlah sebelas kolam telah dihasilkan dari program kebijakan ketahanan pangan ini. Pada proses pembuatan kolam ikan tersebut dilakukan dalam dua kali termin. Empat kolam pertama dibuat pada awal kebijakan ketahanan pangan mulai dikeluarkan oleh Pemerintah, dengan dana awal sebesar Rp 90 juta yang digunakan untuk pembuatan kolam berukuran 20 x 10 m², sewa ekskavator, pengadaan benih ikan, pakan ikan, alat dan fasilitas lain.

Pada tanggal 24 November 2022, Kepala desa melakukan penambahan sebanyak tujuh kolam dengan ukuran 12 x 15 m². Dana yang digunakan untuk pembuatan tujuh kolam tersebut kurang lebih sejumlah Rp 115 juta, terhitung belum termasuk pajak untuk ekskavator sebesar 15%, sehingga total Dana Desa yang telah terpakai dari awal hingga saat ini kurang lebih sebesar Rp 220 juta. Bapak Kepala Desa juga menuturkan bahwa, kolam baru dibuat berbeda ukuran dengan kolam yang pertama sebagai harapan agar mencapai target pendanaan yang baru dan masyarakat desa dapat ikut serta dalam pengelolaan program ini.

3.) Sumber Daya Manusia

Menurut (Pramono, 2022) pada buku “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik” menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan tidak akan berjalan lancar jika implementor tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup meskipun secara jelas dan konsisten kebijakan telah dikomunikasikan. Pada pengelolaan program Kolam Budidaya Ikan, sumber daya manusia yang memiliki peran besar dan penting adalah POKMAS (Kelompok Masyarakat). Kepala Desa Medaeng selaku penanggung jawab penuh program kolam budidaya ikan ikut andil dalam kepengurusan keanggotaan POKMAS (Kelompok Masyarakat). Anggota POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kolam budidaya ikan merupakan masyarakat asli Desa Medaeng yang tinggal di sekitar lokasi program. Struktur kepengurusan dalam pengelolaan program ini terdiri dari tiga pengurus inti yang berisi ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang anggota. Selain POKMAS (Kelompok Masyarakat) juga ada masyarakat sekitar yang turut serta dalam membantu di kolam budidaya ikan, seperti membantu membersihkan lingkungan sekitar kolam dan membuat fasilitas umum di daerah kolam.

4.) Sarana dan Prasarana

Pengelolaan kolam budidaya ikan di Desa Medaeng ini tidak menggunakan sistem upah, namun pihak desa menyediakan sarana dan prasarana di lokasi kolam berada, diantaranya terdiri dari dapur, toilet, dan gudang. Selain itu, kepala desa memberikan konsumsi gratis yang ditujukan untuk para pelaksana kebijakan, seperti kopi, rokok, mie instan dan nasi. Hal ini bertujuan agar para pelaksana program tetap melaksanakan tugas walaupun tidak diberi upah dengan senang hati. Kepala Desa juga menanam di tepi kolam dan sekitar lokasi kolam dengan berbagai macam sayuran, yang mana nantinya bisa dijual ataupun dimasak oleh pengurus kolam. Jenis tanaman yang ditanam di sekitar area kolam seperti, bunga, terong, cabai, pohon jambu air dan pohon pepaya.

Gambar 2.1
Tanaman di sekitar kolam



Sumber : Dokumentasi Peneliti (Oktober, 28)

Gambar 2.2
Kamar Mandi, Gudang dan Dapur



Sumber : Dokumentasi Peneliti (November, 24)

Gambar 2.3
Tempat istirahat



Sumber : Dokumentasi Peneliti (Oktober, 28)

C. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, perilaku, watak dan karakteristik para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Permana & Widnyani, 2020). Oleh sebab itu, Kepala Desa mencari pengurus dengan tolok ukur memiliki jiwa loyalitas yang tinggi, berdedikasi, dan memiliki niat untuk mengelola kolam ikan secara sukarela. Kriteria tersebut dipilih dengan tujuan agar nantinya pengelola program Kolam Budidaya Ikan dapat melaksanakan tugas dengan senang hati. Selain itu, anggota POKMAS (Kelompok Masyarakat) juga bertugas untuk mengelola program ini seperti, memberi pakan ikan pada pagi dan sore hari, menjaga kebersihan kolam agar tetap bersih serta bertanggung jawab dalam proses jual beli ikan kepada masyarakat.

Lokasi kolam budidaya ikan ini terletak sangat dekat dengan pemukiman masyarakat desa dan juga aktivitas masyarakat desa. Akan tetapi, program Kolam Budidaya Ikan ini tidak menggunakan sistem keamanan, seperti penjagaan dan pemberian pagar. Hal ini karena, antara kepala desa dan masyarakat sekitar telah menjalin kerjasama untuk kesuksesan program tersebut. Selain itu, Kepala Desa juga merangkul masyarakat yang memiliki karakteristik negatif agar tidak mengganggu jalannya program ini. Wujud sikap dan perilaku masyarakat, dapat dilihat selama proses pembuatan kolam. Selama proses tersebut, telah terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala. Hal ini karena pihak desa terutama Kepala Desa telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa. Selama program ini berjalan, banyak masyarakat yang ikut andil dalam proses pembuatan kolam ikan atas dasar kemauan sendiri.

D. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dari struktur organisasi yang bertugas merupakan pengertian struktur birokrasi menurut (Pramono, 2022). Struktur pengurus dalam pengelolaan program ini terdiri dari tiga pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang anggota. Hal yang mendasari terbentuknya tiga pengelola inti adalah adanya kekhawatiran tentang munculnya

kesalahpahaman, perdebatan, atau bahkan pertikaian antar anggota dan pengurus dalam pengelolaan program ini.

Kepala desa membentuk sebuah Kelompok Masyarakat (POKMAS) untuk mengelola dana dari program ketahanan pangan. Dana yang dikelola berasal dari Dana Desa yang telah cair sebesar Rp 1,2 miliar. Namun, karena adanya kebijakan dari pemerintah, hanya 20% (dua puluh persen) yang digunakan untuk kebijakan ketahanan pangan. Dana tersebut diberikan sepenuhnya kepada bendahara POKMAS (Kelompok Masyarakat) dan digunakan untuk segala keperluan belanja berupa pembangunan, pengelolaan, dan kontrol. Rinciannya dilaporkan ke Kepala Desa secara online dan terdata kemudian, masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menuju Inspektorat dan berakhir di Kementerian Desa. Pengelolaan Dana Desa tersebut nantinya akan direalisasikan berupa pengontrolan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Saat penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), POKMAS (Kelompok Masyarakat) didampingi oleh Pemerintah Desa bersama Kepala Desa sebagai penanggungjawab anggaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas data keuangan kebijakan ketahanan pangan.

Kolaborasi dari pemerintah desa dengan lembaga lain juga telah terlaksana. Ditunjukkan dari adanya lembaga yang terlibat, yaitu lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan menyepakati segala kegiatan bersama kepala desa. Pihak lembaga BPD juga datang langsung ke tempat kolam budidaya ikan guna mengawasi jalannya program kolam budidaya ikan di Desa Medaeng. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi serta kolaborasi pemerintah desa dengan lembaga penting yang berkesinambungan dengan kolam budidaya ikan di Desa Medaeng sebagai realisasi terlaksananya program pemberdayaan masyarakat

Penutup

Bersumber pada hasil dan pengkajian dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo melalui program Kolam Budidaya Ikan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III, sehingga implementasi kebijakan ketahanan pangan berjalan baik dan efektif. Desa Medaeng memiliki sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program Kolam Budidaya Ikan. Sosialisasi program Kolam Budidaya Ikan disampaikan kepada masyarakat dengan cara realisasi program secara langsung. Demi kelancaran program ketahanan pangan, Kepala Desa mencari pengurus yang memiliki jiwa loyalitas yang tinggi, berdedikasi, dan memiliki niat untuk mengelola kolam ikan secara sukarela. Kepala desa selaku penanggung jawab, selalu mendampingi jalannya program sejak awal hingga terlaksana tanpa ada kendala sampai sekarang ini. Ketersediaan pangan dalam sektor perikanan yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Medaeng diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan ikan dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga dapat terwujud desa yang mandiri.

Meskipun program Kolam Budidaya Ikan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan

Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau dan diperbaiki untuk meningkatkan kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut:

1. Pada variabel komunikasi diperlukan adanya sosialisasi terkait program ketahanan pangan kepada masyarakat secara berkala. Sosialisasi lanjutan perlu dilakukan agar seluruh masyarakat Desa Medaeng mengetahui adanya kebijakan tersebut dalam bentuk program Kolam Budidaya Ikan, sehingga konsep dan tujuan dari program ini dapat tercapai.
2. Pada variabel sumber daya bagian sarana dan prasarana memerlukan penyediaan fasilitas untuk menjual ikan dengan menyediakan sebuah kolam yang berbeda dan lebih layak sesuai dengan pengelompokan jenis ikan yang sama agar memudahkan proses pemanenan dan jual beli kepada masyarakat yang ingin membeli serta masyarakat dapat leluasa untuk memilih ikan yang masih fresh dan tidak kepanasan.
3. Pada sumber daya manusia dan struktur birokrasi memerlukan kerjasama dengan dinas ketahanan pangan untuk melakukan monitoring program kolam budidaya ikan setiap tiga sampai enam bulan sekali. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk menjaga kualitas ikan agar layak untuk dikonsumsi.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), CV. Syakir Media Press (1 ed., Vol. 4, Nomor 1). CV. Syakir Media Press.
- Administrator Sarimekar. (2022). Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. SISTEM INFORMASI DESA SARIMEKAR.
- F. K., Caton, S. J., & Cecil, J. E. (2021). Food Security in Ghanaian Urban Cities: A Scoping Review of the Literature. PUBMED.GOV, 13(10).
- BPSDMP. (2018). PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN BAGI PETANI. UPTD BPSDMP. https://simpeltan.jogjaprovo.go.id/?page=detail_pelatihan&view=12.
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO, Pub. L. No. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 93 TAHUN 2019, 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147182/perbup-kab-sidoarjo-no-93-tahun-2019>.
- DISKETAPANG. (2021). ASPEK-ASPEK PENTING PADA KONSEP KETAHANAN PANGAN. DISKETAPANG Provinsi Banten. <https://disketapg.bantenprov.go.id/Berita/topic/214>
- Fabinyi, M., Dressler, W. H., & Pido, M. D. (2017). Fish, Trade and Food Security: Moving beyond 'Availability' Discourse in Marine Conservation. Human Ecology, 45(2), 177–188. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9874-1>.
- Fazry, R. W. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG. Dinamika: Jurnal Ilmiah

- Ilmu Administrasi Negara, 6(4), 358–375.
- Funge-Smith, S., & Bennett, A. (2019). A fresh look at inland fisheries and their role in food security and livelihoods. *Fish and Fisheries*, 20 (6), 1176–1195. <https://doi.org/10.1111/faf.12403>.
- Karmila, K. (2018). Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Beras) Di Indonesia. *Repository.Usd.Ac.Id*, 1–44. https://repository.usd.ac.id/31198/2/111324022_full.pdf.
- Kemenkeu. (2022). Ini Strategi Pemerintah Dorong Ketahanan Pangan untuk Hadapi Dinamika Global. [kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Dorong-Ketahanan-Pangan](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Dorong-Ketahanan-Pangan).
- Limanseto, H. (2021). Strategi Pemerintah Mendorong Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani. [ekon.go.id https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3044/strategi-pemerintah-mendorong-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-petani](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3044/strategi-pemerintah-mendorong-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-petani).
- Undang-undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.
- Permana, I. G. Y., & Widnyani, I. A. P. S. (2020). Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (1 ed.). Zifatama Jawa. https://books.google.co.id/books?id=XdcHEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI
- Saputri, S. A. D., & Rachmawatie, D. (2020). Budidaya Ikan Dalam Ember : Strategi Keluarga Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 2(1), 102–109.
- Sastrosupadi, A. (2019). KETAHANAN PANGAN DAN BEBERAPAASPEKNYA. *Buana Sains*, 19(2), 47–52.
- H. S., & Supadminingsih, F. N. (2020). Peran Sektor Perikanan Tangkap Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Perikanan Di Provinsi Banten. *Leuit (Journal of Local Food Security)*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.37818/leuit.v1i1.6900>
- Yusuf, R., & Tajerin, T. (2017). KETAHANAN PANGAN IKANI PADA RUMAH TANGGA PERIKANAN TANGKAP LAUT SKALA KECIL: Kasus Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v4i1.5819>